

*Catatan Editor Tamu/Guest Editor's Note***SODALITY MENCARI JALANNYA SENDIRI: SETENGAH ABAD
WARISAN PEMIKIRAN SEDIONO M.P. TJONDRONEGORO*****SODALITY SEARCHES ITS OWN PATH: A HALF CENTURY OF
SEDIONO M.P. TJONDRONEGORO'S INTELLECTUAL LEGACY***Satyawan Sunito^{1,*}¹Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia*)E-mail korespondensi: awansunito@gmail.com

Received: October 14, 2021 | Revised: October 22, 2021 | Accepted: October 24, 2021 | Online publication: October 24, 2021

ABSTRACT

The present review on articles published in this special edition dedicated to Prof. S.M.P. Tjondronegoro focuses on four subject matters. First, on the overall tendency of the articles to focus on the concept sodality and to overlook other intellectual concerns of Tjondronegoro. The second subject deals with the question of why the overwhelming focus of the articles revolves around this concept and this has to do with the understanding of the sodality itself. This concept has been perceived in its most explicit meaning, namely as the smallest territory-based social unit above the household. This understanding ignores the social class aspect of sodality, and the contradiction between the “Desa” which represents the upper class and sodalities which represent the under class at the countryside. This notion of social class was narrated cautiously but by no means unclear by Tjondronegoro. The third subject is on the existence of sodality fifty years after it was firstly launched by Tjondronegoro when the domination of the “Desa” is almost complete, and the status of sodality as analytical concept is questioned. The last subject is on sodality within the broader Indonesian society: how to place sodality in some societies organized dominantly by kinship-based social organizations, predominantly outside Java? One crucial, underlying question run throughout these articles is whether sodality is an intrinsic character of small social units in the Indonesian countryside; or is it something that has to be looked for, developed, and subject to erosion and disintegration?

Kata kunci: *sodality, solidarity groups, countryside, territory-based social units, social class***ABSTRAK**

Review atas artikel-artikel di edisi khusus yang didedikasikan untuk Prof. S.M.P. Tjondronegoro ini memusatkan perhatian pada empat subyek. Pertama, mengenai kecenderungan dari artikel-artikel ini untuk memfokuskan pada konsep sodality yang dianggap paling mewakili pandangan Tjondronegoro, dan dengan begitu mengesampingkan arena-arena lain kepedulian intelektual Tjondronegoro. Pertanyaan mengapa kecenderungan ini terjadi merupakan subjek kedua dari review ini, yaitu perihal pemaknaan para penulis atas sodality. Konsep ini dimaknai sebagaimana narasinya yang paling eksplisit, yaitu unit sosial teritorial di pedesaan yang paling kecil di atas unit rumah tangga. Namun, pemaknaan ini mengesampingkan aspek-aspek yang memberikan sodality ciri sebagai kelas sosial bawah di pedesaan, serta kontradiksinya dengan “Desa” yang diasosiasikan Tjondronegoro sebagai kelas atas di pedesaan. Aspek kelas sosial ini dinarasikan dengan hati-hati oleh Tjondronegoro, namunnya bukannya tidak jelas sama sekali. Subjek ketiga dari review ini adalah keberadaan sodality lima puluh tahun setelah konsep ini dilansir Tjondronegoro. Ketika dominasi “Desa” hampir sempurna dan menjangkau unit-unit teritorial terkecil di pedesaan, apa yang terjadi dengan sodality sebagai konsep analisa? Subjek terakhir adalah sodality dalam kerangka masyarakat Indonesia lebih luas, yakni bagaimana menempatkan konsep ini pada beberapa masyarakat di luar Jawa yang organisasi sosialnya dari tingkat bawah sampai atas berdasarkan prinsip kekerabatan? Salah satu persoalan krusial yang mendasari semua artikel di edisi khusus ini adalah apakah sodality merupakan ciri yang intrinsik dari masyarakat Indonesia? Ataukah sodality justru merupakan suatu ciri yang harus dicari dan dibangun serta dapat mengalami erosi dan disintegrasi?

Kata kunci: *sodality, kelompok solidaritas, pedesaan, unit sosial berbasis teritory, kelas sosial*

Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia

E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

PENDAHULUAN

Edisi khusus ini merupakan *tribute* untuk Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro. Apa lagi yang paling tepat sebagai *tribute* untuk seorang tokoh akademisi dan intelektual seperti Tjondronegoro selain olah pikir dalam bentuk tulisan dan perdebatan akademis? Tulisan review ini adalah bagian dari perdebatan tersebut.

Namun sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut, ungkapan penghargaan untuk para penulis yang telah mengisi Jurnal Sodaloty edisi khusus ini perlu disampaikan: dari luar IPB kepada Setiadi, Gutomo Bayu Aji, dan Setia A. Lenggono, sementara dari IPB kepada Lala M. Kolopaking bersama Fredian Tonny dan Lukman Hakim, Sumardjo bersama Adi Firmansyah dan Leonard Dharmawan, serta kepada Rilus A. Kinseng. Masing-masing artikel dari para penulis ini memberikan tekanan dan fokus pada aspek-aspek berbeda yang sedikit banyak mencerminkan perkembangan lima puluh tahun setelah konsep sodality digagas pertama kali oleh Tjondronegoro.

Empat tema akan dibahas dalam tulisan ini sebagai ulasan atas enam artikel yang dimuat dalam Jurnal Sodaloty edisi khusus ini. *Pertama*, proses seleksi atas pemikiran Tjondronegoro yang terfokus pada konsep sodality; *kedua*, ragam pemaknaan terhadap konsep sodality; *ketiga*, sodality lima puluh tahun kemudian; *keempat*, sodality dalam kerangka masyarakat yang lebih luas.

PROSES SELEKSI ATAS PEMIKIRAN TJONDRONEGORO

Penting untuk disadari bahwa kesemua artikel dalam edisi khusus ini mengusung—dengan beragam pemahaman dan tingkat kedalaman—konsep sodality yang dipahami bersama sebagai konsep sentral di dalam pemikiran Tjondronegoro. Bagaimana tidak, mengingat sodality (untuk mengungkapkannya dalam bahasa kekinian) merupakan sebuah “kebaruan” (*novelty*) dari disertasi yang dipertahankan oleh Tjondronegoro di Universitas Indonesia pada Desember 1977 dan kemudian diterbitkan Oxford University Press pada 1984.

Meski demikian, harus dikatakan bahwa melekatkan Tjondronegoro dengan sodality semata sangatlah tidak lengkap. Membatasi pembahasan hanya pada konsep ini akan menempatkan Tjondronegoro pada ruang akademik yang cenderung aman dan penuh ambigu. Padahal, kiprah Tjondronegoro justru berada di ruang akademik yang kurang aman karena cirinya yang tegas dan tidak ambigu. Inilah ruang akademik yang—bersama dengan Sajogyo, Gunawan Wiradi, dan tidak terlalu banyak tokoh lain—terus melansir kritik terhadap strategi pembangunan-isme yang kurang mengutamakan manusia karena tidak berkeadilan. Hal ini dilakukan oleh Tjondronegoro sejak rezim ororitarian “Orde Baru”¹ sampai pada rezim demokrasi politik (atau rezim Reformasi), bahkan sampai pada akhir hayatnya. Kritik ini tidak ambigu karena Tjondronegoro—lagi-lagi bersama Sajogyo, Gunawan Wiradi, dan tidak terlalu banyak tokoh lain—mengaitkan kemiskinan dengan ketidakadilan agraria. Di luar ini, tema lain yang sejak awal diusung oleh Tjondronegoro adalah lingkungan hidup yang juga dikaitkan dengan kritik beliau terhadap sistem pembangunan yang kurang mengutamakan manusia dan tidak berkeadilan agraria.

Tidak semua penulis artikel mengabaikan fakta kompleksitas pemikiran Tjondronegoro ini. [Tulisan Lala Kolopaking et. al.](#), misalnya, dengan baik menjabarkan relevansi tema-tema pemikiran Tjondronegoro ini di dalam pengembangan mata kuliah di program studi Sosiologi Pedesaan (SPD) pascasarjana IPB dan bahkan seluruh mata kuliah di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Bagi yang tertarik mengetahui “dapur” program studi SPD dan SKPM di IPB sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tulisan ini! Namun, ketika tulisan ini mulai membicarakan konsep sodality pada tingkat yang lebih empiris, yakni ketika membahas “Desa

¹ Tanda kutip perlu dicantumkan karena istilah “Orde Baru” adalah strategi politik yang menyatakan bahwa orde terdahulu sudah ketinggalan jaman, dan “Orde Baru” memberikan jalan pembaruan. Pernyataan demikian tidak ada hubungan dengan analisis politik yang serius.

Membangun”, kompleksitas subjek perhatian Tjondronegoro tidak lagi mendapatkan tempat, terdesak oleh skema kekinian perihal ancaman disrupti teknologi serta berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh teknologi digital bagi eksistensi sodality.

Tulisan Gutomo Bayu Aji menekankan kontinuitas dari hambatan partisipasi petani dalam pembangunan dan berlanjutnya intervensi kepentingan eksternal sampai pada unit-unit sosial yang sebelumnya masih mengambil ciri sodality. Di dalam konteks yang sangat sulit semacam ini, sodality di mata Aji bertransformasi menjadi ruang mediasi budaya dari gerakan agroekologi dan agraria petani di bawah tekanan global. Tulisan Setiadi dengan menarik membeberkan dis-integrasi dari sodality di pedesaan Jawa akibat komersialisasi pertanian, heterogenisasi sosial dan menajamnya diferensiasi sosial yang melahirkan apa yang disebutnya sebagai sebuah “solidaritas semu”. Konteks yang menarik tersebut dapat dimanfaatkan untuk membahas posisi sodality serta transformasinya sebagai konsep analitis yang menerangkan dinamika komunitas desa.

Dengan perkecualian tulisan Aji dan Setiadi ini, dapat dirasakan bahwa di artikel-artikel lain terdapat kekosongan tema mengenai keterkaitan antara “Desa” dengan kepentingan eksternal, dan di pihak lain sodality dengan kepentingan golongan miskin desa, serta hubungan antara kemiskinan dan agraria. Hal ini banyak disebabkan oleh pemahaman para penyumbang artikel atas konsep sodality itu sendiri. Untuk itu, pembahasan berikutnya akan beralih ke tema kedua yang membicarakan mengenai hal ini.

RAGAM PEMAANAAN KONSEP SODALITY

Pemaknaan atas konsep sodality yang paling dekat dengan Tjondronegoro dan penjabarannya yang paling rinci dapat dibaca pada tulisan Kolopaking *et. al.* Bahkan dalam tulisan ini dilengkapi dengan aspek ekologi yang dapat menjadi faktor bagi keragaman unit-unit sosial yang didefinisikan sebagai sodality. Kaitan dengan aspek ekologi ini di dalam tulisan Aji ternyata dapat juga dibuat menjadi lebih bermakna, sekaligus mencerminkan agensi dari petani dengan mengaitkannya dengan konsep dan gerakan agroekologi.

Namun harus dikatakan bahwa kebanyakan artikel dalam edisi khusus ini memaknai konsep sodality terbatas sebagai fenomena sosial pada unit teritori paling kecil di atas rumah tangga, seperti dapat ditemukan pada kesatuan *dukuh*, RW atau RT. Bahkan dalam beberapa artikel, konsep ini dipahami sebagai fenomena sosial yang bersifat *intrinsic* pada unit teritori terkecil tersebut, seperti dapat dilihat pada tulisan Sumardjo *et. al.*, Kolopaking *et. al.*, Kinseng, dan Lenggono.

Bedanya, pada tulisan Kinseng, unit teritori ini juga merangkap sebagai unit sosial nelayan berbasis alat tangkap. Pemaknaan sodality oleh Kinseng semacam ini memberi ruang bagi perluasan cakupan konsep ini dengan syarat kualitas sosial dari ikatan sodality dapat dipertahankan. Sodality yang berbasis teritori dan alat tangkap ini dapat meluas hingga ke unit-unit teritori lain yang dicirikan oleh alat tangkap yang sama. Hal ini dapat ditemukan misalnya di dalam gerakan nelayan *cantrang* ketika melakukan perlawanan atas tekanan kebijakan pemerintah.

Tulisan Sumardjo *et. al.* menunjukkan bahwa unit-unit sodality di antara para petani tambak berhasil dihubungkan dengan organisasi koperasi dan industri pengolahan. Hal ini terjadi karena hubungan atas dasar kepentingan bersama dan *trust* dapat dipertahankan. Kondisi sebaliknya dikemukakan oleh Aji dan Setiadi di dalam tulisan masing-masing. Mereka mengemukakan bahwa sodality dapat meluruh akibat penetrasi pasar dan integrasi lebih dalam dari unit-unit sosial terkecil ini ke dalam kerangka pemerintahan Desa.

Aspek yang nampaknya paling sering *diterlantarkan* dari sodality ini adalah kedekatan konsep ini dengan analisis kelas sosial. Di sini memang dapat dilihat ciri ambigu dari konsep sodality. Namun, apabila dicermati dengan seksama, konsep sodality Tjondronegoro dapat diletakkan dalam kerangka kelas sosial dan bukan sekedar fenomena sosial pada unit teritori terkecil di atas rumah tangga. Tjondronegoro dalam disertasinya tidak menyederhanakan kerangka kelas sosial ini; sebaliknya, ia

mengakui kompleksitasnya dengan mencirikan Desa sebagai simbol semua hal yang mencerminkan golongan atas, sementara sodality dicirikan sebagai segala hal yang mencerminkan golongan bawah namun jauh dari struktur dualitas.

Demikianlah, Desa dicirikan oleh organisasi (formal), orientasi pada kepentingan atas-Desa (program dari atas), modernitas, dan golongan kaya/elite. Sebaliknya, sodality dicirikan oleh kelembagaan (non-formal), orientasi pada kebutuhan warga, tradisi, dan apa yang disebut Tjondronegoro sebagai “*ordinary villagers*”. Tjondronegoro juga mengaitkan sodality dengan golongan yang kekurangan sumber daya. Karena itu, menurut Tjondronegoro, memberdayakan sodality menuntut perluasan akses atas sumber daya agraria dan lapangan kerja melalui industrialisasi pedesaan. Walaupun tidak dinyatakan secara *straight forward*, namun bagi Tjondronegoro sodality bukan sembarang unit teritori yang paling kecil. Kerekatan di antara anggota sodality terbentuk dari kesamaan kepentingan dan kebutuhan hidup yang dibedakan dari warga elite yang diasosiasikan dengan Desa. Hal ini juga mengandaikan bahwa sodality memiliki ciri yang lebih homogen secara sosial dan ekonomi. Memang harus diakui bahwa cara Tjondronegoro mengembangkan konsep sodality semacam ini membuat ciri kelas sosialnya tersamar. Selain itu, kesamaran atau ambiguitas kelas dari sodality ini juga disebabkan oleh penekanan Tjondronegoro sendiri pada unit teritori dan bukan golongan petani.²

Di dalam menanggapi konsep sodality dari Tjondronegoro, para penulis nampaknya berhenti pada sodality sebagai unit teritori dengan ikatan solidaritas, namun tidak merambah lebih jauh pada ciri kelas sosialnya. Apabila dimensi kelas sosial ini diperhitungkan, maka *positioning* sodality di dalam peta sosial yang ada akan lebih problematik. Misalnya, golongan mana yang dicirikan oleh sodality pada petambak dalam tulisan Sumardjo *et. al.* atau nelayan pada tulisan Kinseng? Kedua komunitas ini sebenarnya memiliki struktur sosial yang sangat kompleks. Bagaimana posisi sodality ini *vis a vis* “Desa”? Apakah perluasan *network* sodality petambak dengan koperasi dan industri pengolahan pada tulisan Sumardjo *et. al.* akan berdampak pada terjadinya kooptasi (lihat tulisan Aji mengenai kooptasi ini)? Apakah ada beragam sodality dengan kepentingan dan kebutuhan berbeda di antara nelayan pada tulisan Kinseng (nelayan berdasarkan alat tangkap dan nelayan yang tidak punya alat tangkap), dan bagaimana hubungan di antara mereka semua? Apakah teritori terkecil dengan kompleksitas struktur sosial yang tinggi pada tulisan Setiadi merepresentasikan sodality? Ketika semua golongan mampu memanfaatkan komunikasi digital seperti dibayangkan oleh Kolopaking *et. al.*, apa yang membedakan “Desa” dengan golongan sodality? Apakah sodality sebagai dasar paradigmatis bagi pengembangan Sosiologi Indonesia seperti dibayangkan oleh Lenggono secara empiris merupakan ciri intrinsik dari kenyataan sosial dan sejarah masyarakat Nusantara? Apakah memang ambiguitas dari konsep sodality itu sendiri yang telah memberi ruang bagi kebebasan interpretasi seperti yang didemonstrasikan para penulis?

SODALITY LIMA DEKADE KEMUDIAN

Berbeda dari kondisi lima puluh tahun yang lampau saat Tjondronegoro menulis disertasinya, kini Pemerintahan Desa dapat mencapai unit teritori terkecil sehingga unit seperti dusun sudah terkooptasi oleh formalisasi kelembagaan dan kepentingan Desa (lihat tulisan Aji). Ekspansi pasar mendorong proses diferensiasi sosial yang demikian menajam sampai komunitas pada unit teritori yang terkecil serta merusak moral ekonomi petani dan hubungan *trust* di antara petani (lihat tulisan Setiadi). Itulah gambaran yang realistis dari dunia pedesaan saat ini. Dalam menanggapi kondisi sosial di desa yang ditelitinya, Setiadi menyatakan bahwa sodality telah runtuh dan tersisa sebagai “solidaritas semu”. Sementara Aji dalam tulisannya membayangkan sodality tinggal sebagai ruang mediasi budaya bagi

² Perhatikan kritik dari van Ufford (dikutip dalam tulisan Aji) yang menyatakan bahwa di dalam konsep sodality Tjondronegoro para petani nampak pasif di dalam terpaan kepentingan global. Kritik van Ufford ini tentunya antara lain dilandasi oleh penekanan Tjondronegoro sendiri atas teritori sebagai unit sosial dan bukan atas golongan petani.

petani yang memungkinkan agensi petani di dalam perjuangan agroekologi dan agraria dalam rangka menghadapi tekanan eksternal dan global.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa sodality bukanlah merupakan ciri khas dan intrinsik dari unit teritori terkecil di atas rumah tangga. Sodality harus ditemukan dan diperjuangkan, tetapi ia juga dapat luruh dan bahkan runtuh oleh proses-proses sosial-ekonomi yang bersifat eksternal maupun internal. Merupakan sebuah pertanyaan apakah dalam konteks konfigurasi kelas sosial, terdapatnya sodality dapat diasumsikan sebagai semacam kondisi *class-fur-sich*? Suatu kondisi di mana kesadaran kelas telah terbentuk dan sodality dapat mencerminkan agensi dari petani yang saling bekerja sama untuk kepentingan dan kebutuhan bersama, menentang arus ekspansi kepentingan “Desa”. Suatu kondisi yang tidak bersifat intrinsik, melainkan dapat tumbuh atau berubah oleh kombinasi proses eksternal dan internal.

SODALITY DALAM KERANGKA MASYARAKAT YANG LEBIH LUAS

Untuk suatu bangsa yang mega multi-etnik seperti Indonesia, pertanyaan yang harus diajukan adalah: apa makna sodality pada beberapa masyarakat di mana organisasi sosial yang berbasis kekerabatan (baik nyata maupun diandaikan)—seperti organisasi sosial marga, klan, dan suku—masih dominan di dalam menentukan distribusi aset dan kesempatan bagi warganya? Sayangnya, tidak ada artikel dalam edisi khusus ini yang dengan khusus menggarap pertanyaan ini sehingga sodality masih nampak sebagai fenomena Jawa semata.

Lebih dari tulisan yang lain, tulisan Lenggono mematri sodality sebagai sebuah ciri yang intrinsik—bukan saja untuk unit teritori terkecil di atas rumah tangga, namun untuk masyarakat Indonesia; sebuah “atom sosial” dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep sodality diangkat hingga ke tataran ideologi, layaknya Marhaen dan Sarinah. Sodality oleh Lenggono dijadikan sebagai landasan dari konsep Sosiologi Indonesia yang berideologi Pancasila. Di sini kita masuk ke dalam ranah indigenisasi dari sosiologi atau ilmu sosial. Suatu tema yang memiliki periode pasang surut dalam perkembangan keilmuan di Indonesia, namun tidak pernah mati.

Di sini bukan tempatnya untuk mendiskusikan indigenisasi sosiologi atau ilmu sosial; dibutuhkan satu ruang diskusi tersendiri untuk itu. Namun, dua hal penting dikemukakan. *Pertama*, menempatkan penggagas konsep sodality—Tjondronegoro—sebagai eksponen indigenisasi sosiologi adalah tidak tepat. Indigenisasi sosiologi tidak sama dengan mendorong para ilmuwan Indonesia terjun ke dalam perdebatan dan pengembangan teori dari masyarakatnya sendiri. Tjondronegoro masuk dalam kategori terakhir ini dan konsep sodality merupakan salah satu contohnya. *Kedua*, mematrikan konsep sodality sebagai ciri intrinsik suatu unit sosial akan menimbulkan konsekuensi konsep tersebut menjadi tidak produktif, yakni menjadi konsep yang tidak lagi memiliki daya menerangkan. Pada saat yang sama, memberikan suatu unit sosial ciri yang bersifat intrinsik akan membuat sifat dinamis dari unit sosial tersebut diabaikan.

PENUTUP

Sebagai penutup, sesuatu harus dikemukakan mengenai hubungan antara Tjondronegoro dengan konsep sodality yang paling dikaitkan dengan dirinya. Konsep sodality—sebagaimana konsep-konsep analitis lain—diciptakan di dalam ruang sosial-politik tertentu. Dalam hal sodality, konteks tersebut adalah rezim otoritarian “Orde Baru”.

Pada tahun 1977, ketika disertasi dengan konsep sodality itu dipertahankan oleh Tjondronegoro, rezim “Orde Baru” berada pada puncak kekuasaannya. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa ruang kebebasan akademik tidak memberi tempat cukup bagi konstruksi pandangan yang berkaitan dengan kelas sosial. Pemahaman atas konsep sodality rasanya harus ditempatkan pada latar tersebut.

Walaupun demikian, seperti telah diterangkan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengatakan bahwa konsep sodality memiliki dimensi kelas sosial yang dengan khas dikemas oleh Tjondronegoro dengan cara yang elegan namun bukannya tidak jelas. Di dalam konteks ruang akademik yang lebih terbuka saat ini, alangkah baiknya untuk mempertegas dimensi kelas sosial pada konsep sodality ini.